



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD: PERSEPSI PEGAWAI DINAS PROVINSI DIY

Anik Fatun Najahningrum [□]

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2013

Disetujui Juli 2013

Dipublikasikan Agustus 2013

Keywords:

Fraud, Law Enforcement, Effectiveness of Internal Control, Information Asymmetry, Organizational Commitment, Cultural Ethical Management

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi pegawai di instansi pemerintahan tentang pengaruh penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan budaya etis organisasi terhadap fraud di sektor pemerintahan. Populasi penelitian ini terdiri dari 128 pegawai yang bekerja pada subbagian keuangan Dinas Provinsi DIY. Penelitian ini merupakan penelitian populasi sehingga responden dari penelitian ini merupakan seluruh populasi. Kuesioner yang memenuhi syarat adalah 111 responden. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis full model *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan alat analisis *smartPLS*. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif antara penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara budaya etis organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the perceptions of employees in government agencies on the effects of law enforcement, effectiveness of internal control, information asymmetry, distributif justice, procedural justice, and organizational commitment and cultural ethical management to fraud in the government sector. The study population consisted of 128 employees who work at the Department of DIY financial subsections. This research is a population research that respondents of this study are all population. Questionnaires qualify as 111 respondents. Data collection using questionnaires. Analyzed using a full model of Structural Equation Modeling (SEM) with smartPLS analysis tools. The results showed a negative effect between law enforcement, effectiveness of internal control, distributif justice, procedural justice and organizational commitment to fraud in the government sector, there is a positive effect between information asymmetry with fraud in the government sector, there is no effect between procedural justice by fraud in the government sector.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gdg. C6 Lt. 2, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang, 50233

E-mail: anikfatunnajahningrum@gmail.com

ISSN 2252-6765

PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan (*fraud*) merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. *Statement of auditing standart* dalam norbarani (2012) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit.

Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dan juga bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam entitas pemerintah sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik sehingga angka yang tercantum di laporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya.

Berdasarkan data forum indonesia untuk transparansi anggaran (*fitra*) provinsi daerah istimewa yogyakarta merupakan provinsi paling bersih dari korupsi nomor 2 setelah bangka belitung dengan nilai korupsi sebesar rp 4 miliar. Berdasarkan data dari *infokorupsi.com* terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di yogyakarta yang menunjukkan nilai yang sangat berlawanan dengan data yang diungkap *fitra*. Kasus tersebut antara lain kasus yang terjadi di provinsi diy sendiri, bantul, sleman, gunungkidul, dan kulonprogo. Kasus yang terjadi di provinsi diy antara lain kasus korupsi dana rekonstruksi pasca gempa senilai rp 6,4 miliar dan yang terbaru kasus bus trans jogja yang ditaksir merugikan negara senilai rp 12,5 miliar. Kasus yang terjadi di bantul antara lain kasus pengadaan buku ajar senilai rp 250 juta, kasus pembelian bantul radio senilai 1,7 miliar dan kasus penjualan tanah kas desa bangunharjo senilai rp 8 miliar. Kasus korupsi yang terjadi di sleman adalah kasus korupsi hibah koni sleman senilai rp 1 miliar dan korupsi buku ajar senilai rp 12,1 miliar. Kasus korupsi yang terjadi di kulonprogo adalah kasus korupsi APBD senilai rp 12,1 miliar. Sementara kasus korupsi yang terjadi di gunungkidul adalah kasus korupsi

dana tunjangan anggota dpr dan kasus duplikasi anggaran asuransi pns masing-masing sebesar rp 2,8 miliar dan rp 1,7 miliar.

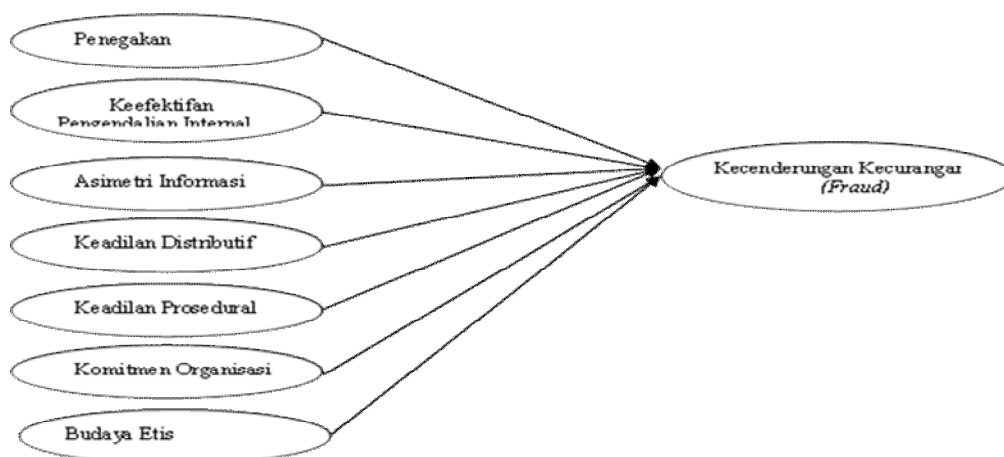
Berdasarkan kasus-kasus di atas, total semua kasus korupsi yang terjadi di yogyakarta adalah senilai rp 58,55 miliar. Belum lagi, menurut *infokorupsi.com* ada beberapa kasus dugaan korupsi yang belum dilimpahkan ke pn. Contoh kasus dugaan korupsi adalah kasus *markup* dana perjalanan dinas dan kasus halte bus transjogja.

Motivasi seseorang melakukan kecurangan atau *fraud* relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan *fraud* adalah *fraud triangle theory*. *Fraud triangle* terdiri atas tiga komponen yaitu *opportunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), dan *rationalization* (rasionalisasi) (Cressey dalam tuannakota, 2013).

Kesempatan atau *opportunity* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup entitas pemerintahan antara lain penegakan peraturan, keefektifan sistem pengendalian internal, dan asimetri informasi.

Menurut Salam (2005) dalam Kurniawati (2012), tekanan (*pressure*) yaitu insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku *gambling*, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Tekanan merupakan faktor yang berasal dari kondisi individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dari dalam diri seseorang tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat bekerja. Salah satu, faktor lingkungan yang dapat menyebabkan tekanan pada seorang pegawai adalah mengenai keadilan organisasional dalam perusahaan. Keadilan tersebut berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapatkan *reward* berupa gaji atau kompensasi lain atas pekerjaannya (keadilan distributif) dan bagaimana prosedur berkaitan

dengan *reward* yang tersebut (keadilan prosedural).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Menurut Skousen (2009) dalam Norbarani (2012) rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Budaya organisasi dan komitmen organisasi merupakan faktor yang diduga dijadikan alasan pembenaran mengapa pegawai melakukan kecurangan.

Beberapa penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi akuntansi dan moralitas manajemen berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi, sementara kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi, dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pristiyanti (2012) melakukan penelitian pada pemerintah kota dan Kabupaten Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kecurangan, sementara sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan

komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan. Penelitian Kusumastuti (2012) menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Obyek dari penelitian ini adalah Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan penelitian dilakukan di Yogyakarta dikarenakan banyaknya isu mengenai dugaan korupsi yang kasusnya sampai sekarang masih mengambang. Selain itu, menurut survey ICW pemerintah provinsi menempati posisi ketiga kategori lembaga negara terkorup se-Indonesia. Selain itu, penelitian dilakukan pada dinas provinsi dikarenakan penelitian sebelumnya sudah dilakukan pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan obyek yang berbeda.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang diajukan maka diambil hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis:

- H1 :penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap *fraud*.
- H2 :keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*.
- H3 :asimetri informasi berpengaruh positif terhadap terhadap *fraud*.

- H4 :kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.
 H5 :keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap *fraud*.
 H6 :budaya etis manajemen berpengaruh negatif terhadap *fraud*.
 H7 :komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja di subbagian keuangan dinas provinsi diy sebanyak 128 pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian populasi atau sensus, sehingga populasi dalam penelitian ini dijadikan responden. sementara kuesioner yang memenuhi syarat adalah 111 responden. Data diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing responden. Dimana penilianannya dengan skala likert 1-5 dengan rincian sebagai berikut: 1 = sangat tidak setuju (sts), 2 = tidak setuju (ts), 3 = netral (n), 4 = tidak setuju (ts), 5 = sangat setuju (ss).

Variabel Penelitian

Variabel Endogen (Y)

Federal Bureau Of Investigation (FBI) dalam Jatiningtyas (2011) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan-tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Pengukuran variabel ini memiliki 9 item pertanyaan yang dikembangkan dari

jenis-jenis kecurangan menurut *association of certified fraud examinations* (acfe) dalam rudianto (2012), yang terdiri dari: (1) kecurangan laporan keuangan, (2) penyalahgunaan aset dan (3) korupsi.

Variabel Eksogen (X)

Keuangan Daerah menurut Pp No. 58 Tahun 2005 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penegakan peraturan dikembangkan dari penelitian zulkarnain (2013) dengan indikator: (1) ketaatan terhadap hukum, (2) proses penegakan hukum, (3) peraturan organisasi, (4) disiplin kerja, dan (5) tanggung jawab.

Menurut Mulyadi (2001:163) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Indikator pengukuran variabel keefektifan pengendalian internal dikembangkan dari pp nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah yaitu: (1) lingkungan pengendalian,(2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern.

Asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Wilopo,2006). Instrumen yang digunakan untuk mengukur asimetri informasi terdiri dari enam indikator yang dikembangkan oleh Dunk (1993) dalam Wilopo (2006) yaitu: (1) situasi di mana pihak intern instansi memiliki informasi yang lebih baik atas *aktivitas*, (2) situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal hubungan *input-output*, (3) situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui potensi kinerja,(4) situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal teknis pekerjaan, (5) situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal,dan (6)situasi di mana pihak intern instansi lebih mengerti apa yang dapat dicapai

Keadilan distributif merupakan keadilan yang dipersepsikan mengenai bagaimana penghargaan dan sumberdaya didistribusikan di seluruh organisasi (Ivancevich *et al* 2006: 161). Indikator pengukuran variabel keadilan distributif dikembangkan dari penelitian colquitt (2001) dalam Pristiyanti

(2012) yaitu : (1) kompensasi menggambarkan usaha yang dilakukan, (2) kompensasi menggambarkan apa yang diberikan kepada perusahaan dan (3) kompensasi sesuai dengan kinerja

Keadilan prosedural merupakan pertimbangan yang dibuat oleh karyawan mengenai keadilan yang dipersepsikan mengenai proses dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya (Ivancevich *et al* 2006). Indikator pengukuran variabel keadilan prosedural dikembangkan dari penelitian Colquitt (2001) dalam pristiyanti (2012) yaitu: (1) prosedur kompensasi mengekspresikan pandangan dan perasaan, (2) penetapan prosedur kompensasi melibatkan karyawan / prosedur kompensasi diaplikasikan secara konsisten, (3) prosedur kompensasi tidak mengandung kepentingan tertentu, (4) prosedur kompensasi didasarkan pada informasi yang akurat, (5) prosedur kompensasi memungkinkan pemberian masukan dan koreksi dan (6) prosedur kompensasi sesuai dengan etika dan moral.

Komitmen organisasi menunjukkan penerimaan seseorang terhadap nilai-nilai serta tujuan organisasi. Sikap yang diambil oleh pegawai berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan menunjukkan seberapa besar komitmen pegawai tersebut terhadap organisasi tempatnya bekerja. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Luthans (2006) dalam pristiyanti (2012) yaitu: (1) bekerja melalui target, (2) membanggakan organisasi kepada orang lain,

HASIL DAN PEMBAHASAN

(3) menerima semua tugas, (4) kesamaan nilai,(5) bangga menjadi bagian dari organisasi, (6) organisasi merupakan inspirasi, (7) gembira memilih bekerja pada organisasi dan (8) peduli pada nasib organisasi.

Menurut Pristiyanti (2012) budaya etis organisasi adalah persepsi karyawan mengenai suatu pola tingkah laku, kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi semua anggota organisasi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penegakan peraturan dikembangkan dari penelitian robins (2008) dengan indikator: (1) model peran yang *visible*, (2) komunikasi harapan-harapan etis, (3) pelatihan etis, (4) hukuman bagi tindakan etis dan (5) mekanisme perlindungan etika.

Metode Analisis Data

Penelitian ini metode analisis datanya menggunakan *structural equation modeling* (sem) yaitu suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi *smartpls* versi 2. Metode analisis yang dilakukan antara lain statistik deskriptif, dan statistik inferensial (uji outer model, uji inner model)

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Modus	Sum	Std. Deviation
KK	111	9	39	17,189	18	1908	6,418
PP	111	5	25	20,432	22	2268	4,124
KPI	111	6	25	20,081	24	2229	3,773
AI	111	6	29	12,73	7	1413	4,598
KD	111	5	20	15,261	16	1694	3,221
KPI	111	8	35	27,468	27	3049	5,113

KO	111	9	40	3,919	32	3543	6,113
BEO	111	5	25	19,441	20	2158	3,495

Sumber : Data diolah, 2013

Statistik Deskriptif

Dari statistik deskriptif pada Tabel 1 dapat diketahui nilai mean kk sebesar 17,189 yang berarti bahwa kecenderungan kecurangan masuk dalam kategori jarang terjadi. Nilai mean pp sebesar 20,432 yang berarti bahwa penegakan peraturan masuk dalam kategori tegak. Nilai mean kpi sebesar 20,081 yang berarti bahwa keefektifan pengendalian internal masuk dalam kategori efektif. Nilai mean ai sebesar 12,730 yang berarti bahwa asimetri informasi masuk dalam kategori rendah. Nilai mean kd sebesar 15,261 yang berarti bahwa keadilan distributif masuk dalam kategori adil. Nilai mean kp sebesar 27,468 yang berarti bahwa keadilan prosedural masuk dalam kategori adil. Nilai mean ko sebesar 31,919 yang berarti bahwa komitmen organisasi masuk dalam kategori tinggi. Nilai mean beo sebesar 19,441 yang berarti bahwa budaya etis organisasi masuk dalam kategori etis.

Uji Outer Model

Uji Convergent Validity

Dalam penelitian ini terdapat 8 variabel yaitu penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan procedural, komitmen organisasi, budaya etis manajemen, dan *fraud* di sektor pemerintahan. Pegujian validitas penelitian menggunakan alat bantu hitung yaitu *smartpls* ver 2.0. Berdasarkan output pls dapat disimpulkan bahwa dari semua pertanyaan yang diajukan hasilnya valid.

Uji Composite Reliability

Dari uji reliabilitas pada Tabel 2 dilihat bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena *composite reliability* dan *cronbach alpha* masing-masing variabel lebih besar dibandingkan nilai standar umum yang dibentuk, yaitu 0,70.

Uji Discriminant Validity

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji *discriminant validity* atau uji korelasi antar variabel menunjukkan nilai akar kuadrat ave setiapa konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model pada *correlation of latent variables*, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

Uji Inner Model

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *r-square* kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan *fraud* (k) 0,949. Nilai *r-square* sebesar 0,949 memiliki arti bahwa variabilitas konstruk kecurangan (*fraud*) dapat di jelaskan oleh variabilitas konstruk penegakan peraturan (pp), keefektifan pengendalian internal (kpi), asimetri informasi (ai), keadilan distributif (kd), keadilan prosedural (kp), komitmen organisasi (ko), dan budaya etis organisasi (beo) sebesar 94,9 % sedangkan 5,1 % dijelaskan oleh konstruk lain di luar penelitian.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

	Cronbachs Alpha		Composite Reliability
AI	0,928297	AI	0,944006
BEO	0,878418	BEO	0,911781
KD	0,919168	KD	0,943011

KK	0,953454	KK	0,960359
KO	0,943944	KO	0,953377
KP	0,944269	KP	0,954492
KPI		KPI	
PP	0,932681	PP	0,948926

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 3. AVE & Correlation of Latent Variables

	AVE	Akar AVE		AI	BEO	KD	KK	KO	KP	KPI	PP
AI	0,738105	0,859	AI	1,000							
BEO	0,6752	0,821	BEO	-0,685	1,000						
KD	0,805476	0,987	KD	-0,571	0,5762	1,000					
KK	0,729323	0,853	KK	0,9150	-0,740	-0,669	1,000				
KO	0,719069	0,847	KO	-0,746	0,585	0,5037	0,815	1,000			
KP	0,749913	0,865	KP	-0,760	0,6776	0,6779	0,843	0,6729	1,000		
KPI			KPI	-0,873	0,6762	0,5723	0,917	0,7537	0,7829	1,000	
PP	0,788012	0,887	PP	-0,733	0,6133	0,3707	0,822	0,731	0,6205	0,8141	1,000

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 4. R-Square

	R Square
Asimetri Informasi	
Budaya Etis Organisasi	
Keadilan Distributif	
Kecenderungan Kecurangan	0,949135
Komitmen Organisasi	
Keadilan Prosedural	
Keefektifan Pengendalian Internal	
Penegakan Peraturan	

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 5. Uji Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STERR)	Standard Error (STERR)
AI -> KK	0,31539	0,306772	0,05475	5,760586	0,05475
BEO -> KK	-0,03885	-0,041065	0,049066	0,791788	0,049066
KD -> KK	-0,134525	-0,138592	0,038937	3,454972	0,038937
KO -> KK	-0,108364	-0,116962	0,047397	2,28628	0,047397
KP -> KK	-0,154261	-0,149184	0,045213	3,4119	0,045213

KPI -> KK	-0,169513	-0,191084	0,07942	2,134384	0,07942
PP -> KK	-0,20408	-0,178763	0,072602	2,81095	0,072602

Sumber: Data diolah, 2013

Uji Hipotesis

Variabel penegakan hukum/peraturan (pp) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0,204 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,810 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian h_1 dapat diterima. Jadi, lemahnya penegakan peraturan dalam suatu instansi, akan membuka peluang bagi pegawai yang bekerja dalam instansi tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan.

Variabel Keefektifan Pengendalian Internal (KPI) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0,169 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,134 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian h_2 dapat diterima. Jadi, jika sistem pengendalian internal dalam instansi sudah berjalan efektif, maka kemungkinan kecurangan (*fraud*) yang terjadi juga akan semakin kecil.

Variabel Asimetri Informasi (AI) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0,315 dan nilai *t-statistic* sebesar 5,760 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud*, dengan demikian h_3 dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi akan meningkatkan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*).

Variabel keadilan distributif (KD) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0,134 dan nilai *t-statistic* sebesar 3,545 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian h_4 dapat diterima. Artinya, semakin adil keadilan distributif maka akan semakin rendah kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Variabel keadilan prosedural (KP) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar -0,154 dengan nilai *t-statistic* sebesar 3,411. Ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian h_5 dapat diterima. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa semakin adil keadilan prosedural dalam suatu instansi, maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi.

Variabel Komitmen Organisasi (KO) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0,108 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,286 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian h_6 dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi akan semakin rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi.

Variabel budaya etis organisasi berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 0,791 berada di bawah nilai *t*-tabel sebesar 1,983. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara budaya etis organisasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), sehingga h_7 tidak dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang etis tidak dapat menekan kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi dalam suatu instansi. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh lingkungan lain di luar organisasi (zulkarnain,2013).

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan peraturan, keefektifan

pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan; terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan; dan tidak terdapat pengaruh antara budaya etis organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Mulyadi. 2002. "Auditing". Jakarta : salemba empat
Ivancevich *et al.* 2006. "Perilaku dan manajemen organisasi" jakarta : erlangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Detik.news.2012."Ini dia peringkat provinsi terkorup di indonesia versi fitra"
<http://news.detik.com/read/2012/10/01/053204/2047460/10/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesia-versi-fitra>. Diunduh tanggal 12 januari 2013
- Jatiningtyas, nurani.2011."Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di wilayah semarang".*skripsi*.semarang:fakultas ekonomi undip
- Kusumastuti, nur ratri.2012."Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening".*skripsi*: semarang: undip
- Norbarani, listiana. 2012. "pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan analisis *fraud triangle* yang diadopsi dalam sas no.99".
Skripsi.semarang : fakultas ekonomi undip
- Pristiyanti, ika ruly.2012."Persepsi pegawai instansi pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan."*Skripsi*. Semarang : fakultas ekonomi unnes.
- Tuanakotta, theodorus.2007."Akuntansi forensik & audit investigatif" jakarta : lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas indonesia.
- Wilopo.2006."Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di indonesia."*Simposium nasional akuntansi 9 padang*.
- Rudianto.2012."Faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*): persepsi pegawai koperasi simpan pinjam (ksp) se-kota semarang.
Skripsi.semarang : fakultas ekonomi unnes
- Zulkarnain, rifqi mirza.2013."Analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pada dinas kota surakarta". *Accounting analysys journal aaj1(3)(2013)*